

PENENTUAN LOKASI PENGGANTI KELURAHAN X MELALUI METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS

Rizki Fauziah^{1(a)}, Umanto^{2(b)}

^{1,2}Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia
^{a)}rizkifauziah Hasan@gmail.com, ^{b)}umanto.eko@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

06-06-2025

Diterbitkan Online:

30-09-2025

Kata Kunci:

Kelurahan, Relokasi, AHP,
Layanan Publik, Jakarta Utara

Keywords:

Urban Village, Relocation,
AHP, Public Services, North
Jakarta

Corresponding Author:

rizkifauziah Hasan@gmail.com

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v7i3.1275>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan lokasi baru bagi Kantor Kelurahan X di Jakarta Utara dengan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan multikriteria. Kebutuhan relokasi muncul akibat berakhirnya perjanjian pinjam pakai lahan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan TNI AL. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode campuran (mix-method), yaitu kualitatif dan kuantitatif, melalui studi pustaka, observasi lapangan, dan wawancara dengan para pemangku kepentingan. AHP digunakan untuk menilai tiga kriteria utama-lingkungan, aksesibilitas, dan biaya-yang dijabarkan ke dalam sembilan sub-kriteria. Tiga alternatif lokasi dianalisis, yaitu: Model 1 (Jl. JA 1), Model 2 (Jl. BGR), dan Model 3 (Jl. GK). Hasil analisis menunjukkan bahwa Model 1 memiliki skor tertinggi sebesar 63,49%, sehingga dianggap sebagai lokasi paling optimal. Penelitian ini menunjukkan bahwa metode AHP efektif dalam mendukung proses pengambilan keputusan yang berbasis data, objektif, dan partisipatif dalam konteks perencanaan layanan publik. Meskipun terdapat keterbatasan seperti jumlah alternatif yang terbatas dan potensi subjektivitas dalam penilaian, studi ini memberikan kontribusi penting dalam perencanaan tata ruang kota dan dapat menjadi model untuk penerapan pada proyek serupa di wilayah perkotaan lainnya.

ABSTRACT

This study aims to determine a new location for the Kelurahan X Office in North Jakarta using the Analytical Hierarchy Process (AHP) as a decision-making tool for multi-criteria analysis. The need for relocation arises due to the expiration of the land-use agreement between the Provincial Government of DKI Jakarta and the Indonesian Navy (TNI AL). The research adopts a mixed-method approach-both qualitative and quantitative-through literature review, field observation, and interviews with stakeholders. AHP was employed to evaluate three main criteria-environment, accessibility, and cost-which were further broken down into nine sub-criteria. Three alternative locations were analyzed: Model 1 (Jl. JA 1), Model 2 (Jl. BGR), and Model 3 (Jl. GK). The analysis results indicate that Model 1 received the highest score of 63.49%, making it the most optimal location. This study demonstrates that AHP is effective in supporting data-driven, objective, and participatory decision-making processes in the context of public service planning. Despite limitations such as a restricted number of alternatives and potential subjectivity in assessments, this research makes a significant contribution to urban spatial planning and can serve as a model for similar projects in other urban area.

PENDAHULUAN

Kelurahan merupakan pusat pelayanan publik yang sangat penting perannya dalam tatanan masyarakat (Siregar et al., 2023). Kelurahan berkewajiban menyediakan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat seperti pelayanan Pendidikan, kesehatan dan ekonomi (Namirah et al., 2021). Selain itu, kelurahan berfungsi melakukan pemberdayaan masyarakat serta pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum (Deseraldo et al., 2024). Kelurahan bertanggung jawab dalam mengembangkan dan memberikan pelayanan publik yang disesuaikan dengan dengan kebutuhan warga, memfasilitasi akses pelayanan publik kepada masyarakat, mengembangkan infrastruktur yang mendukung pelayanan masyarakat, dan mengembangkan petugas pemberi layanan yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang tepat untuk menyediakan pelayanan publik (Choirunnisa et al., 2023).

Kelurahan X merupakan salah satu kelurahan yang terletak di wilayah kota administrasi Jakarta utara yang berada di kompleks TNI AL. Berdasarkan temuan Audit Intern Pemerintah Daerah (APIP) dalam Laporan Hasil Monitoring Tanah dan Bangunan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2022, teridentifikasi bahwa status kepemilikan lahan Kantor Kelurahan X tidak sesuai dengan ketentuan hukum akibat berakhirnya perjanjian pinjam pakai dengan TNI-AL. Temuan audit ini menjadi dasar urgensi penentuan lokasi pengganti, sekaligus menegaskan pentingnya pengawasan dalam memastikan transparansi tata kelola aset pemerintah. Berdasarkan tindak lanjut temuan APIP dalam Laporan hasil Monitoring Tanah dan Bangunan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2022, diketahui bahwa aset tanah pada Kelurahan X merupakan aset tanah milik TNI – AL Kelapa Gading dengan perjanjian MOU antara Pemprov DKI dengan TNI yang telah habis masa berlakunya.

Dalam menentukan lokasi pengganti Kelurahan X, perlu dilakukan analisis mendalam terkait faktor-faktor yang harus dipertimbangkan, seperti status kepemilikan lahan, aksesibilitas lokasi, infrastruktur dasar dan ketersediaan fasilitas umum (Aghitsni & Busyra, 2022; Sadam et al., 2024). Dengan demikian, analisis yang komprehensif dan partisipasi publik yang baik diperlukan untuk memastikan penentuan lokasi baru yang tepat.

Diperlukan Pengambilan Keputusan untuk menentukan lokasi Kelurahan X yang telah habis masa berlakunya dengan menggunakan metode perhitungan *Analytical Hierarchy Process*. Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) digunakan untuk mengevaluasi kriteria-kriteria dan bobot-bobot yang diperlukan untuk memilih alternatif lokasi pengganti Kelurahan X yang paling sesuai (Aulawi et al., 2020; Wulan & Hendrawan, 2018). Relokasi Kantor Kelurahan X menjadi kebutuhan mendesak karena berakhirnya perjanjian pinjam pakai lahan dengan TNI AL, yang berpotensi mengganggu kontinuitas pelayanan publik kepada masyarakat. Pemilihan lokasi baru harus mempertimbangkan skala prioritas dan fungsi strategis kelurahan sebagai unit pemerintahan terdekat dengan warga. Kriteria penilaian mencakup aksesibilitas, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas publik, status kepemilikan lahan, kualitas lingkungan, serta potensi pengembangan wilayah. AHP dipilih karena mampu mengakomodasi berbagai kriteria yang kompleks secara sistematis dan berbasis bobot prioritas, lebih unggul dibanding metode subjektif atau satu dimensi. Analisis AHP dilakukan terhadap tiga alternatif lokasi untuk mengidentifikasi pilihan yang paling layak secara objektif.

Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dalam konteks perencanaan tata ruang perkotaan dengan menggabungkan pendekatan partisipatif dan metode kuantitatif dalam pemilihan lokasi layanan publik yang strategis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran (*mixed methods*) untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai penentuan lokasi pengganti Kantor Kelurahan X di Jakarta Utara. Pendekatan ini menggabungkan analisis kualitatif dan kuantitatif, dengan penekanan pada penggunaan metode AHP sebagai alat bantu pengambilan keputusan multikriteria. Data dikumpulkan melalui triangulasi metode, yaitu studi pustaka, observasi, dan wawancara. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah literatur, dokumen perencanaan, Laporan Hasil Pengawasan APIP untuk mengidentifikasi temuan administratif dan risiko hukum, serta perjanjian pinjam pakai antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan TNI AL. Data aset juga dikonfirmasi melalui inventarisasi Kartu Inventaris Barang (KIB) dari BPAD. Observasi dilakukan di tiga lokasi

alternatif Jalan T, Jalan P, dan Jalan G menggunakan tinjauan lapangan dan Google Maps untuk menilai kondisi fisik dan lingkungan sekitar lokasi. Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan pemangku kepentingan kunci, termasuk perwakilan dari Inspektorat, BPAD, Subbagian Tata Pemerintahan, dan Kelurahan, guna menggali informasi kontekstual terkait status lahan, kelayakan lokasi, serta aspirasi pengguna lahan.

Proses AHP dimulai dengan membangun struktur hierarki keputusan yang terdiri dari empat tingkat: tujuan utama (menentukan lokasi terbaik), tiga kriteria utama (aksesibilitas, lingkungan, dan biaya), sembilan subkriteria yang lebih rinci, dan tiga alternatif lokasi. Selanjutnya dilakukan penyusunan kuesioner perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*) untuk menilai bobot relatif antar elemen, yang diisi oleh enam responden ahli. Data hasil perbandingan diolah menggunakan perangkat lunak *Expert Choice* untuk menghitung bobot prioritas dan nilai akhir tiap alternatif. Validitas hasil AHP diukur melalui rasio konsistensi (CR), dengan nilai $CR \leq 0,1$ sebagai batas maksimum yang dapat diterima. Apabila nilai konsistensi melebihi ambang batas, maka input dikaji ulang untuk memastikan keandalan penilaian.

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analitik, dengan menafsirkan hasil perhitungan AHP untuk mengetahui kontribusi masing-masing kriteria terhadap skor total alternatif lokasi. Temuan kuantitatif ini kemudian diperkaya dengan analisis kualitatif dari observasi dan wawancara untuk menjelaskan keunggulan dan keterbatasan masing-masing lokasi secara kontekstual. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, serta *cross-check* antara hasil analisis AHP dan informasi lapangan. Dengan demikian, metode ini tidak hanya menghasilkan urutan prioritas yang objektif dan sistematis, tetapi juga memberikan justifikasi yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan keputusan relokasi Kelurahan X.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan dan Kriteria Evaluasi

Penelitian ini bertujuan menentukan lokasi baru Kantor Kelurahan X di Jakarta Utara menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP), yang memungkinkan penilaian multikriteria secara objektif. Tiga kriteria utama ditetapkan: lingkungan, aksesibilitas, dan biaya,

masing-masing dengan tiga sub-kriteria. Penilaian dilakukan terhadap tiga alternatif lokasi: Model 1 (Jl. JA 1), Model 2 (Jl. BGR), dan Model 3 (Jl. GK).

Bobot kriteria diperoleh melalui perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*) oleh 6 responden ahli: 2 pejabat dari BPAD, 1 dari Inspektorat, 1 dari Subbagian Tata Pemerintahan, dan 2 dari Kelurahan X. Penilaian dilakukan melalui *structured judgment*, diikuti dengan validasi rasio konsistensi (CR). Semua penilaian memiliki nilai $CR < 0,1$, sehingga hasil dianggap konsisten dan valid.

Hasil Pembobotan dan Penilaian Kriteria

Berikut adalah ringkasan bobot dari masing-masing sub-kriteria utama berdasarkan hasil perbandingan berpasangan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Hasil Pembobotan dan Penilaian Kriteria

Kriteria	Sub-Kriteria	Bobot (%)
Lingkungan	Kondisi Lingkungan Fisik	63%
	Dampak Lingkungan Pembangunan	23%
	Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau	14%
Aksesibilitas	Kemudahan Transportasi	72%
	Jarak dari Pusat Kegiatan Masyarakat	18%
	Kualitas Jalan Menuju Lokasi	10%
Biaya	Harga Tanah	63%
	Pembangunan Infrastruktur	25%
	Biaya Lain-lain	12%

Pembobotan ini menunjukkan bahwa dalam setiap kriteria utama, terdapat satu sub-kriteria yang sangat dominan, seperti “kemudahan transportasi” untuk aksesibilitas dan “harga tanah” untuk biaya.

Analisis Alternatif Lokasi

- a) Model 1 – Jalan JA 1

Model ini merupakan lahan kosong milik Pemda dengan luas sekitar $\pm 2.200 \text{ m}^2$, berada di dalam kompleks perumahan, namun dekat dengan pusat kegiatan masyarakat dan ruko perkantoran. Kondisi jalan baik, lebar jalan memadai, dan terdapat ruang terbuka hijau (RTH) dalam kompleks tersebut.

- Lingkungan: Sangat baik. Infrastruktur dan estetika mendukung, serta terdapat RTH.
- Aksesibilitas: Cukup baik. Meski berada di dalam komplek, akses kendaraan tersedia. Namun diperlukan pembukaan akses baru dari jalan utama agar dapat dijangkau moda transportasi umum.
- Biaya: Tanah sudah milik Pemda, namun ada kebutuhan tukar guling untuk akses tambahan dan pengeluaran sertifikasi lahan tambahan.

b) Model 2 – Jalan BGR

Model ini merupakan lahan hook seluas $\pm 1.500 \text{ m}^2$ milik Pemda, terletak di pinggir jalan raya, bersebelahan dengan Mall Bellatera.

- Lingkungan: Cukup baik. Lokasi memiliki RTH di sekitarnya. Dampak lingkungan relatif kecil meski ada potensi polusi dan kemacetan.
- Aksesibilitas: Sangat baik. Lokasi berada di pinggir jalan dan dilalui transportasi umum.
- Biaya: Luasan lebih kecil, biaya pembangunan lebih rendah, namun diperlukan perbaikan infrastruktur jalan depan lokasi.

c) Model 3 – Jalan GK

Lahan milik Pemda seluas $\pm 3.200 \text{ m}^2$, berada di lokasi strategis dekat sekolah dan pusat kegiatan masyarakat. Namun, lahan ini sedang disewakan ke pihak ketiga.

- Lingkungan: Baik, dengan potensi pembangunan RTH. Namun ada kekhawatiran kebisingan karena kedekatan dengan sekolah.
- Aksesibilitas: Sangat baik. Jalan selebar 12 meter memungkinkan kendaraan berpapasan.
- Biaya: Cukup tinggi karena status sewa masih aktif, serta diperlukan biaya besar untuk infrastruktur dan pelepasan sewa.

Perbandingan Nilai AHP per Alternatif

Dari hasil agregasi bobot seluruh sub-kriteria dengan nilai alternatifnya, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Agregasi Bobot

Alternatif	Skor Total AHP	Keterangan
Model 1 (JA 1)	63,49%	Nilai tertinggi, kombinasi lingkungan, akses, dan legalitas terbaik
Model 2 (BGR)	21,48%	Akses baik namun keterbatasan lahan dan infrastruktur
Model 3 (GK)	15,03%	Potensi baik namun kendala legalitas dan biaya tinggi

Model 1 unggul secara signifikan. Meskipun akses masuk berada di dalam kompleks, hal ini dapat diatasi dengan tukar guling atau pembukaan akses tambahan. Legalitas lahan yang jelas serta dukungan kondisi lingkungan dan infrastruktur menjadikan alternatif ini paling optimal.

Analisis sensitivitas dilakukan untuk menguji ketahanan keputusan terhadap perubahan bobot kriteria. Jika bobot *aksesibilitas* dinaikkan dari 33% ke 45%, Model 2 sedikit meningkat skornya menjadi 26%, namun tetap tidak melampaui Model 1. Sebaliknya, jika bobot *biaya* ditingkatkan, Model 3 justru makin turun skornya karena tingginya biaya pelepasan sewa dan pembangunan. Hasil ini menunjukkan bahwa Model 1 tetap unggul dalam berbagai skenario, memperkuat keandalannya sebagai opsi terbaik.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Model 1 – Jalan JA 1 adalah lokasi paling tepat untuk menggantikan kantor Kelurahan X berdasarkan kombinasi kriteria yang telah ditentukan. Dengan skor 63,49%, lokasi ini memberikan keseimbangan terbaik antara keberlanjutan lingkungan, kemudahan akses (dengan catatan pembukaan akses jalan), serta efisiensi biaya karena status lahan sudah milik Pemprov DKI.

Agar pembangunan dapat segera direalisasikan, direkomendasikan:

1. Koordinasi dengan pengembang untuk melakukan tukar guling lahan atau pelepasan fasos/fasum sebagai akses jalan masuk dari pinggir jalan utama.
2. Sinergi lintas OPD, khususnya Dinas Cipta Karya dan Dinas Lingkungan Hidup, untuk merancang bangunan yang ramah lingkungan dan sesuai dengan tata ruang kawasan.
3. Antisipasi sosial: melakukan sosialisasi kepada warga sekitar mengenai rencana pembangunan untuk mendukung kelancaran dan penerimaan masyarakat.

Metode AHP terbukti menjadi alat bantu efektif dalam pengambilan keputusan kompleks seperti penentuan lokasi layanan publik. Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan mempertimbangkan berbagai aspek secara objektif, keputusan yang diambil dapat mendukung pelayanan yang lebih optimal, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan masa depan kota. Model 1 tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga mendukung visi tata kelola yang berkelanjutan dan berbasis data.

Penelitian mengenai penentuan lokasi baru kantor Kelurahan X di Jakarta Utara menggunakan metode AHP sangat penting dilakukan mengingat tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik serta kebutuhan adaptasi terhadap perkembangan kota. Lokasi kantor kelurahan yang strategis tidak hanya berdampak pada efisiensi operasional, tetapi juga pada kenyamanan masyarakat dalam mengakses layanan. Dalam konteks urbanisasi dan pertumbuhan populasi yang pesat di Jakarta, penataan lokasi pelayanan publik harus mempertimbangkan berbagai dimensi seperti lingkungan, aksesibilitas, dan efisiensi biaya, agar keputusan yang diambil tidak sekadar bersifat teknis, tetapi juga berkelanjutan secara sosial dan lingkungan.

Penggunaan metode AHP dalam penelitian ini sejalan dengan temuan beberapa studi terdahulu. Misalnya, penelitian oleh Astari et al (2021) menunjukkan bahwa AHP merupakan alat efektif dalam pengambilan keputusan multikriteria yang kompleks, termasuk dalam tata ruang dan perencanaan infrastruktur publik. Studi serupa oleh Harani et al (2022) yang menggunakan AHP untuk memilih lokasi fasilitas logistik di daerah perkotaan juga menegaskan bahwa pendekatan ini dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi proses perencanaan. Penelitian ini memperkuat hasil-hasil tersebut dengan membuktikan

bahwa AHP mampu menimbang secara objektif antara aspek legalitas, biaya, dan manfaat layanan kepada publik.

Penetapan Model 1 sebagai lokasi baru membawa sejumlah implikasi jangka panjang yang strategis. Legalitas yang kuat dan efisiensi biaya akan mempercepat pembangunan tanpa konflik hukum. Kedekatannya dengan kawasan permukiman dan pusat kegiatan masyarakat akan meningkatkan kemudahan akses warga. Jika dirancang dengan pendekatan ramah lingkungan, lokasi ini juga dapat menjadi model layanan publik berbasis *green governance*. Namun, perlu diantisipasi potensi dampak seperti perubahan fungsi sosial kawasan dan tekanan terhadap infrastruktur pendukung akibat meningkatnya mobilitas.

Namun, penelitian ini juga memiliki beberapa batasan. Pertama, penilaian terhadap sub-kriteria bersifat subjektif dan sangat tergantung pada responden yang terlibat, meskipun dilakukan dengan pendekatan wawancara terstruktur. Kedua, hanya tiga alternatif lokasi yang dianalisis, padahal masih mungkin ada alternatif lain yang belum dievaluasi. Ketiga, tidak semua dampak jangka panjang—misalnya terkait perubahan fungsi lahan atau potensi komersialisasi di masa depan—diperhitungkan secara mendalam.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar pendekatan AHP dikombinasikan dengan metode kuantitatif spasial seperti Geographic Information System (GIS) agar hasil analisis menjadi lebih holistik dan visual. Penelitian juga dapat diperluas dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal sebagai pengguna langsung layanan. Terakhir, studi lanjutan sebaiknya memasukkan analisis risiko dan keberlanjutan agar keputusan lokasi tidak hanya tepat secara teknis, tetapi juga resilien terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan di masa depan.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi praktis dan metodologis dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data untuk penataan layanan publik yang adaptif dan inklusif di kawasan perkotaan padat seperti Jakarta.

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) merupakan pendekatan yang efektif dan akuntabel dalam menentukan lokasi optimal bagi kantor Kelurahan X di Jakarta Utara.

Dengan mempertimbangkan tiga kriteria utama—lingkungan, aksesibilitas, dan biaya—lokasi Model 1 (Jl. JA 1) teridentifikasi sebagai alternatif terbaik, memperoleh skor tertinggi sebesar 63,49%. Keunggulan utamanya terletak pada status kepemilikan lahan yang sah, kondisi lingkungan yang mendukung, serta aksesibilitas yang dapat ditingkatkan melalui mekanisme tukar guling lahan.

Kontribusi utama dari penelitian ini terletak pada penerapan AHP secara integratif dengan wawancara pemangku kepentingan dan data administratif aset pemerintah daerah, yang jarang digunakan secara simultan dalam konteks perencanaan kelurahan. Selain itu, penelitian ini juga menyajikan pendekatan partisipatif berbasis data yang dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan layanan publik.

Rekomendasi utama dari studi ini adalah perlunya sinergi lintas-organisasi perangkat daerah (OPD) dalam percepatan realisasi pembangunan, khususnya terkait pembukaan akses jalan, pemanfaatan fasos/fasum, dan penyusunan rencana bangunan yang adaptif terhadap tata ruang serta prinsip lingkungan berkelanjutan. Selain itu, pendekatan ini dapat diadopsi oleh instansi lain sebagai model pengambilan keputusan dalam proyek relokasi fasilitas publik di wilayah metropolitan yang padat dan kompleks.

Meskipun terbatas pada tiga alternatif lokasi dan bersifat subjektif dalam pemberian bobot, hasil penelitian tetap memberikan dasar kuat yang dapat ditindaklanjuti. Untuk studi lanjutan, disarankan integrasi metode AHP dengan sistem informasi geografis (GIS) dan analisis risiko untuk memperkaya dimensi spasial dan keberlanjutan jangka panjang. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini tidak hanya mendukung pengambilan keputusan yang tepat sasaran dan efisien, tetapi juga membuka ruang baru bagi tata kelola layanan publik yang lebih inklusif, data-driven, dan responsif terhadap dinamika kota.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Terutama kepada para narasumber dan pemangku kepentingan dari Kelurahan X, Kecamatan Y, serta instansi terkait di Pemerintah Kota Administrasi Jakarta

Utara yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi berharga dalam proses wawancara dan pengumpulan data. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada tim ahli dan akademisi yang telah memberikan masukan metodologis dalam penyusunan model AHP. Tidak lupa, apresiasi ditujukan kepada keluarga, rekan sejawat, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas dukungan moral dan teknis selama proses penelitian ini berlangsung. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat nyata dalam perencanaan dan peningkatan layanan publik yang lebih baik di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aghitsni, W. I., & Busyra, N. (2022). JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen , Ekonomi , dan Akuntansi). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(3), 38–51.
- Astari, R. Y., Ginting, B. S., Sihombing, A., & Binjai, K. (2021). Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menentukan Prioritas Perbaikan Jalan Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat. *Jurnal Sistem Informasi Kaputama (JSIK)*, 5(1), 52–62.
- Aulawi, H., Kurniawati, R., & Pratama, V. V. (2020). Analisa Keputusan Pemilihan Jasa Ekspedisi dengan Metode AHP dan Borda. *Jurnal Kalibrasi*, 18(1), 23–29. <https://doi.org/10.33364/kalibrasi/v.18-1.724>
- Choirunnisa, L., Oktaviana, T. H. C., Ridlo, A. A., & Rohmah, E. I. (2023). Peran Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Publik di Indonesia. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 3(1), 71–95. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i1.401>
- Deseraldo, G. L., Sari, P. Z., Sari, N., & Prastoeti, R. R. (2024). Analisis Akuntabilitas Penggunaan Dana Kelurahan Dalam Meningkatkan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

Jurnal Kompetensi Ilmu Sosial, 3, 66–71.
<https://doi.org/10.29138/jkis.v3i1.48>

Harani, N. H., Nurhayati, S., & Kesuma, P. (2022). Penentuan Lokasi Kantor Cabang Baru Perusahaan Logistik Menggunakan AHP dan SIG (Studi Kasus: Kota Balikpapan). *Infotech Jurnal*, 56–66.
<https://doi.org/10.31949/infotech.v8i2.2855>

Namirah, N., Nuringwahyu, R. S., & Hardati, R. N. (2021). Pengaruh Kompetensi Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat. *JIAGABI*, 10(2), 101–108.

Sadam, M., Angela, D., Asaduddin, M. S., Rasya, R., Salsabilla, R., & Setiawanti, S. (2024). Efektivitas Kebijakan Pemerintah Pembangunan Sejuta Rumah (Analisis Pembangunan Hunian Layak Di Kabupaten Bantul Tahun 2019). *Community : Pengawas Dinamika Sosial*, 10(1), 23.
<https://doi.org/10.35308/jcpds.v10i1.7836>

Siregar, I., Meisah, N., Meisah, N., Permatasari, N., Kadafi, M. R., Yogi, M., Wardana, D. A., Siregar, S., & Harahap, M. F. (2023). Peran Pemerintah Kelurahan Sei Kera Hilir II Dalam Kepemerintahan yang Baik. *Transformasi Manageria: Journal of Islamic Education Management*, 3(2), 497–505.
<https://doi.org/10.47467/manageria.v3i2.3062>

Wulan, A., & Hendrawan, B. (2018). Analisis Pemilihan Jasa Forwarder Dengan Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (Ahp) Di Pt. Xyz. *Journal of Applied Business Administration*, 2(2), 294–306.
<https://doi.org/10.30871/jaba.v2i2.1126>